

PETANI & TANAH DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI PERTANIAN

Meisanti

Sejarah Pertanian

Pertanian secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang mengeksploitasi sumberdaya alam melalui penciptaan ekologi buatan yang mendukung budidaya tanaman dan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Budidaya tanaman dalam kegiatan pertanian selalu memerlukan tanah sebagai media tumbuh. Tanah dari pandangan ekonomi adalah modal produksi untuk menghasilkan keuntungan, sedangkan dari bingkai sosiologi tanah lebih bermakna sebagai sebuah nilai atau norma yang mendukung pemenuhan kehidupan manusia. Sejak dahulu, hubungan manusia dengan tanah terlihat melalui kearifan lokal khususnya pada kegiatan pertanian. Untuk dapat memanfaatkan tanah secara optimal, nyaman dan tanpa sengketa maka secara yuridis status tanah tersebut harus jelas. Tulisan ini akan menganalisis tanah dari perspektif sosiologi pertanian dalam kaitannya dengan petani dan kegiatan pertanian.

Kegiatan pertanian merupakan bagian dari sejarah peradaban yang paling tua di dunia. Dimulai ketika manusia mulai melakukan budidaya tanaman dan ternak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari bukti sejarah, perkembangan peradaban pertanian diperkirakan mulai sekitar 8000-12.000 tahun SM. Bukti adanya peradaban pertanian ditemukan pada daerah bulan sabit yang subur di Timur Tengah antara sungai Tigris dan Eufrat. Penemuan ini menunjukkan adanya budidaya tanaman biji-bijian dan kacang-kacangan. Selanjutnya peradaban pertanian berkembang hampir bersamaan pada beberapa tempat di dunia seperti di Eropa, Afrika dan Asia khususnya Tiongkok.

Dalam sejarah perkembangan pertanian di dunia, ilmuwan yang banyak menyumbangkan pemikirannya adalah seorang muslim yang berasal dari Andalusia pada abad ke-12. Ia adalah Ibnu Awwam atau Abu Zakariya ibnu Muhammad ibnu Ahmad al Awwam al Ishbili. Sumbangan pemikiran Ibnu Awwam tidak terbatas hanya pada ilmu tanaman tapi juga ternak. Ibnu Awwam dikenal sebagai pakar agronomi pertama yang menulis kitab Al-Filaha. Kitab Al Filaha terdiri dari 34 bab dimana 30 bab tentang pertanian dan 4 bab terakhir tentang peternakan. Tokoh muslim kedua adalah Al Dinawari (828-896 M) atau Abu Hanifah Ahmad Ibnu Dawud Al Dinawari, berasal dari Iran dan dikenal sebagai bapak Botani dimana ia menulis kitab Al Nabat (buku tumbuh-tumbuhan atau botani). Dalam bukunya dijelaskan tentang tanah, karakteristik, sifat dan tanah yang baik untuk ditanami serta penjelasan 637 jenis tanaman.

Budidaya Pertanian dalam Islam

Bercocok tanam merupakan keutamaan dalam islam. Menurut pandangan islam, melakukan pekerjaan di bidang pertanian merupakan pekerjaan yang mulia dan bernilai ibadah tinggi. Hasil dari kegiatan pertanian yang dinikmati manusia ataupun makhluk lainnya akan mendatangkan pahala. Rasulullah SAW bersabda;

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau bertani kemudian burung, manusia atau binatang ternak memakan hasilnya, kecuali semua itu merupakan sedekah baginya” (HR Bukhari).

Banyak ayat dalam Al-Quran menyebutkan tentang pertanian, diantaranya produktivitas tanah yang terlantar Q.S. Yasin (36) ayat 34-35, proses fotosintesis dan pembentukan klorofil dalam Q.S. Thaha (20) ayat 53, Q.S. Al An'am (6) ayat

99. Perkawinan tumbuhan Q.S. Yasin (36) ayat 36., produktivitas tanaman Q.S. Al Mu'minun (23) ayat 20, surah Abasa (80) ayat 27-31, pengaruh air terhadap tanaman surah Yunus (10) ayat 24.

Dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana Allah menciptakan tanah sebagai hamparan yang dapat menghasilkan berbagai jenis tanaman untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tanaman yang tumbuh di atas tanah dipengaruhi oleh interaksi antar faktor-faktor biotik, antar faktor-faktor abiotik maupun antara faktor-faktor biotik dan abiotic. Tanaman yang memiliki klorofil dapat melakukan proses fotosintesis dengan bantuan energy matahari untuk menghasilkan makanan sendiri. Proses pembuahan pada tanaman dapat dibantu oleh air dan angin (faktor abiotic) serta serangga dan manusia (faktor biotik). Sesungguhnya semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Untuk menghargai nikmat Allah tersebut manusia selayaknya bersyukur dan mengolah lahannya secara bijak, memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan agar budidaya tanaman di atas lahan-lahan pertanian dapat berkelanjutan.

Setiap sumberdaya memiliki daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumberdaya diperbarui itu dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi apabila batas itu dilampaui, sumberdaya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumberdaya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan (Soemarwoto, 2008)

Pelestarian tanah sebagai sumberdaya hanya dapat terjadi jika petani mengeksploitasi tanah secara bijaksana dengan memperhatikan syarat-syarat konservasi atau pengawetan tanah. Apabila tidak dilakukan maka akan terjadi tanah kritis, yaitu tanah mengalami kerusakan fisik, kimia atau biologi yang membahayakan fungsi hidrologi, konservasi dan ekonomi adanya tanah. Beberapa faktor yang mempercepat proses kemerosotan tanah menurut Tohir

(1991) adalah sifat dari tanah, keadaan lingkungan (topografi dan vegetasi), iklim, perilaku manusia dalam penggunaan lahan dan waktu.

Pertanian dan Kebudayaan

Pertanian bagi petani Indonesia sesungguhnya adalah *the way of life* atau cara untuk hidup. Meski globalisasi telah menjangkau ke pelosok negeri namun bagi sebagian besar masyarakat desa, secara sosiologi tetap menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertanian. Boleh jadi masyarakat desa telah memiliki pekerjaan lain seperti menjadi guru, ASN (Aparatur Sipil Negara), ataupun pedagang namun mereka tetap mempertahankan tanah yang dimilikinya untuk kegiatan pertanian. Seorang guru desa, di luar kegiatan rutusnya mengajar di sekolah akan mencurahkan waktunya untuk tetap bertani sekalipun hanya menanam sayuran di lahan pekarangannya. Seorang pegawai yang bekerja di kantor kelurahan, tetap mempunyai sebidang lahan yang ditanami padi untuk kebutuhan subsistensi pangan keluarganya. Dobrowolski (1958) menyebut kehidupan semacam ini sebagai 'tradisi' yang secara umum mencakup total warisan budaya yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada dua media dasar penularan warisan sosial, pertama terdiri dari transmisi melalui ucapan dan rangsangan suara lainnya yang diterima oleh indera pendengaran serta demonstrasi tindakan dan objek yang dirasakan oleh organ visual. cara penularan ini selalu melibatkan kontak langsung dengan manusia. kedua, ada media transmisi yang memiliki karakter mekanis. yaitu media membebaskan produsen dan penerima konten budaya melalui kontak langsung.

Petani dimanapun memiliki hubungan yang istimewa dengan lahannya, sesempit apapun lahan yang dimilikinya atau bahkan setelah ia kehilangan lahan pertaniannya. Bertani merupakan cara hidup yang tidak lepas dari sebagian besar masyarakat tani di Indonesia.

Redfield (1985), seorang Antropolog Amerika dalam bukunya Masyarakat Petani dan Kebudayaan, menjelaskan sikap petani di berbagai belahan dunia. Pada abad ke-19, tepatnya di Yucatan dan Boecati, ada tiga sikap atau nilai yang dianut petani yaitu pertama sikap yang intim dan hormat terhadap tanah, kedua pekerjaan pertanian adalah lebih baik sedangkan perdagangan tidaklah terlalu baik, dan ketiga melakukan kegiatan produktif merupakan sebuah kebajikan utama. Dalam buku itu, Redfield membahas tulisan Hesiod tentang kebijaksanaan dan kesalehan sebagai peri kehidupan petani dimana petani Maya mengajari anaknya bagaimana menggunakan kapak dan parang sekaligus menjaga agar anak muda menundukkan kepalanya waktu beribadah ketika hutan dibersihkan untuk ditanam, memperlakukan tanaman jagung dengan hormat dan menjaga ladang jagung sebagai tempat yang suci. Redfield menyimpulkan dari tulisan Hesiod bahwa alam adalah milik manusia dan milik penciptanya sekaligus, alam ditempa dengan rasa hormat dan sopan yang menyertainya, pekerjaan petani adalah tindakan praktis yang diliputi perasaan religius. Bagi orang Indian Maya, cara hidup dengan bekerja keras sebagai petani adalah terhormat dalam agama dan keutamaan bagi seorang lelaki.

Praktik bertani secara religius dan hormat juga dilakukan masyarakat tani di Indonesia. Penelitian yang dilakukan penulis tahun 2013 di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara menemukan suku pendatang asal Bali melalui program transmigrasi, memperlakukan tanah dan air dengan rasa hormat dalam kegiatan pertanian. Sebelum menanam padi sawah, mereka melakukan upacara pelepasan air agar tanaman padinya dapat tumbuh subur, lahannya mendapat air yang cukup, tanahnya tidak terkena puso, jauh dari serangan hama dan penyakit sehingga sawahnya dapat berproduksi dengan melimpah. Bahkan ketika sumber air nyaris habis oleh kegiatan tambang emas, petani tetap melakukan ritual upacara pelepasan air secara lengkap. Selain dalam kegiatan menanam, penghormatan terhadap alam di Kabupaten Bombana juga dilakukan oleh petani primitif lokal. Sejak jaman dahulu, orang-orang suku Moronene telah

melakukan penangkapan udang di sungai menggunakan bubu (alat tangkap udang tradisional) dengan ukuran tertentu yang menjaga agar udang-udang kecil dapat lolos dari bubu tersebut sehingga sungai tetap mampu menjaga daya regenerasi atau daya lenting ketersediaan udang.

Peasant bukan Farmer

Membahas mengenai petani di Negara kita maka yang terlintas di pikiran adalah sekelompok orang-orang yang bekerja berpeluh keringat setiap hari untuk berjuang di lahannya demi bertahan hidup. Benar, petani kita adalah *peasant*, bukan *farmer* yang memiliki *farm* yang luas dan hidup sejahtera seperti di negara-negara lain yang pertaniannya maju dan modern. *Peasant* adalah mereka yang tergolong petani kecil dengan sumber daya terbatas. *Peasant* kita kebanyakan bertani secara subsisten, menanam untuk kebutuhan pangan keluarganya. Jikapun ada yang dijual, hanya dilakukan ketika kebutuhan subsistensi keluarga tani telah terpenuhi. Mereka yang melakukan usahatani dalam skala besar untuk tujuan komersil tidak dapat digolongkan sebagai peasant. Mereka adalah kapitalis yang terus menerus melakukan akumulasi lahan dan makin meminggirkan *peasant* demi kepentingan ekonominya. Kaum kapitalis di Indonesia telah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan dan dewasa ini mengalami peningkatan yang terlihat dari makin banyaknya terjadi alih fungsi lahan-lahan pertanian produktif untuk kepentingan ekonomi kapitalis. Marx dalam bukunya *Das Capital Volume I* chapter 27 telah menyebutkan bagaimana peralihan lahan-lahan pertanian secara besar-besaran oleh kaum borjuis di Inggris yang mempunyai kekuatan kapital (modal) besar. Kaum borjuis pemilik lahan-lahan besar melakukan pengusiran paksa kaum tani proletariat melalui perampasan tanah. Pada masa itu, petani-petani kecil yang ada di Inggris dianggap sebagai perambah tanah negara sehingga tempat tinggal petani dan buruh diratakan dan diambil paksa.¹ Selanjutnya pada bagian II digambarkan

¹ Marx, Karl. 1887. *Capital a Crit ique of Political Economy* Volume I. halaman 510.

oleh Marx bagaimana kaum proletariat menjadi buruh-buruh yang dieksploitasi secara tidak adil sehingga terjadilah konflik yang dikenal sebagai pertentangan kelas antara kaum borjuis dan kaum proletariat. Revolusi yang terjadi pada akhirnya menciptakan perubahan dari kapitalisme menjadi sosialisme.

Meski perubahan kepemilikan lahan di Indonesia tidak terjadi melalui perampasan namun secara nyata terlihat bagaimana lahan-lahan pertanian mengalami perubahan kepemilikan dan perubahan fungsi. Pembangunan yang terjadi telah menggeser lahan-lahan pertanian produktif diambil alih oleh para kapitalis pemilik uang untuk pembangunan perumahan-perumahan, pabrik, jalan dan berbagai fasilitas lainnya sehingga tidak mengherankan jika lahan-lahan pertanian produktif secara signifikan terus berkurang.

Peasant di Indonesia memiliki lahan-lahan yang berukuran kecil yaitu kurang dari 0,5 ha. Hampir dua decade lalu, data BPS tahun 2005 yang didasarkan hasil sensus pertanian 2003 menunjukkan jumlah petani kecil dengan luas lahan kurang dari 0,5 ha adalah 56,2 persen. Dengan perkembangan pembangunan yang diikuti tingginya alih fungsi lahan maka saat ini diperkirakan jumlah petani kecil tersebut sebagian telah menjadi petani gurem, yaitu petani dengan luas lahan kurang dari 0,1 ha. Permasalahan lahan bagi petani bukan saja ukurannya yang kecil tetapi juga oleh letaknya yang terpencar dan status kepemilikan lahan yang belum jelas.

Jika petani memiliki lahan yang cukup luas misalnya lebih dari 1 ha (biasanya di luar pulau Jawa), maka lahan tersebut seringkali berada pada beberapa hamparan yang berbeda atau terpencar-pencar sehingga tidak memungkinkan petani memanfaatkan lahan-lahan tersebut untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Hasil riset penulis pada petani di luar pulau Jawa yaitu di daerah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, petani umumnya memiliki lebih dari satu lahan yang berukuran kecil-kecil antara 0,2 ha hingga 1 ha yang terakumulasi menjadi lebih dari 1 ha. Petani hanya akan mengolah lahannya

yang paling subur (biasanya dekat sumber air) dan terdekat dari rumah. Lahan lainnya biasanya berada di desa tetangga, di seberang sungai ataupun di atas gunung (daerah ketinggian) sehingga sulit untuk dijangkau petani. Alat-alat pertanian seperti traktor juga sulit digunakan di ketinggian ataupun dibawa ke seberang sungai. Dari aspek teknis dan ekonomis mengolah lahan yang terpecah dianggap tidak efisien serta memiliki resiko lebih besar. Sebagai contoh, petani tidak memiliki modal finansial untuk membayar tenaga kerja luar keluarga dan juga membeli input-input usahatani. Dengan modal terbatas petani akan secara rasional berhati-hati menggunakan sumberdaya yang dimilikinya. Menurut Mosher (1991), petani adalah manusia yang berpikir rasional dan bekerja untuk mendapatkan tujuan hidupnya tanpa tekanan dari pihak manapun. Dari aspek moral ekonomi, Scott (1981) menyatakan bahwa petani dalam bertindak dan mengambil keputusan selalu mengutamakan *safety first* (dahulukan selamat) sebagai pilihan yang rasional jika menyangkut resiko usahatani. Dari aspek budaya, petani-petani tua memiliki tipikal yang membudaya secara turun temurun tidak akan merubah perilakunya secara relevan sekalipun perubahan yang ditawarkan menguntungkan dari aspek ekonomi. Bagi peasant tua, alat dan peralatan pertanian, teknik pertanian, sistem penguasaan lahan adalah bentuk tertentu keluarga patriarchal peninggalan sistem klan lama yang akan dipertahankan sebagai bentuk otoritas di desa (Dobrowolski, 1958)

Modal Sosial dan Jaminan Sosial di Desa

Peasant memang tidak memiliki kekuatan dari segi modal usaha. Untuk melakukan usahatani setiap musim, kebanyakan peasant bergantung pada kebaikan hati patron atau pemilik modal. Ini lebih terasa pada petani penggarap ataupun buruh tani yang tidak memiliki lahan dan menggarap lahan-lahan milik patron. Kebanyakan kasus hilangnya lahan disebabkan oleh menumpuknya hutang yang tidak dapat ditebus petani (hasil riset penulis di Kabupaten

Bombana Sulawesi Tenggara Tahun 2013), sedangkan di sebuah Kabupaten tertinggal di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Jeneponto, petani kehilangan lahan disebabkan oleh faktor tidak langsung yaitu tingginya pencurian ternak sapi dimana sapi adalah tabungan bagi penduduk desa yang dapat diuangkan dengan cepat untuk membayar hutang-hutang petani kecil. Ketika petani kehilangan ternak sapinya maka dengan terpaksa lahannya harus dilepaskan untuk membayar hutang (hasil riset penulis di Kabupaten Jeneponto tahun 2014).

Untuk menyambung hidup, petani yang sebelumnya memiliki lahan akhirnya turun status menjadi petani penggarap. Petani tanpa lahan ini bergantung pada modal sosial yang dimilikinya. Putnam (1993) mendefinisikan sosial capital sebagai suatu bentuk organisasi sosial berupa kepercayaan, norma dan jaringan kerja yang dapat meningkatkan efisiensi dalam konunitas masyarakat melalui fasilitasi tindakan yang terkoordinir.² Memanfaatkan jaringan kerja dan kepercayaan dari patron pemilik modal atau tuan-tuan tanah desa, petani penggarap mendapatkan bantuan berupa modal usaha tani (lahan dan sarana produksi), jaminan makanan serta upah menggarap. Biasanya, lahan tuan-tuan tanah yang menjadi pembayaran atas hutang petani kecil akan dipinjamkan kembali kepada petani dengan sistem bagi hasil atau tanpa imbalan sekalipun. Secara norma, tuan-tuan tanah akan dianggap tidak memiliki norma jika membiarkan petani yang lahannya diambil menjadi jatuh dalam kemiskinan hingga kelaparan.

Suatu konsolidasi pemilikan lahan, kekuasaan dan hubungan patron klien di desa-desa seperti fenomena diatas diamati oleh Scott (1981) terjadi bukan hanya di Indonesia. Sekalipun miskin, petani dapat terus hidup dan menafkahi keluarganya oleh adanya *social insurance* (jaminan sosial) yang berlaku di desa. Scott melihat bahwa Sejak tahun 1920-an, kegagalan panen enam kali berturut-

² Robert D Putnam. 1993. Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy. Princeton, N.J: Princeton University Press. Hal 167

turut di Propinsi Hungyen (Tonkin) Vietnam menyebabkan petani terpaksa menyerahkan lahan-lahan pertaniannya kepada rentenir setempat. Para rentenir akhirnya memperoleh lahan yang luas dan tetap membiarkan petani-petani menggarap tanah itu atas dasar bagi hasil. Rentenir bahkan melindungi mereka dari resiko-resiko kegagalan tanam sebagai penyewa. Bahkan apabila petani/buruh penggarap ini mendapat kecelakaan atau jatuh sakit akibat pekerjaannya maka majikan harus menjamin makanan dan kebutuhan-kebutuhannya serta upahnya. Dalam praktiknya, mekanisme jaminan sosial berlaku di Tonkin dengan sifat hubungan yang mengandung unsur patronase dan juga eksploitasi.³

Kehidupan peasant dengan lahan sempit dan terjatuh kedalam kemiskinan yang lebih dalam oleh kehilangan lahannya (biasanya akibat hutang oleh berbagai penyebab) diamati oleh Geertz (1963) sebagai involusi pertanian. Involusi menggambarkan pola pertanian di Jawa yang kental oleh semangat komunal yang kompleks. Hal ini mempengaruhi sistem budaya termasuk gotong royong, resiprositas dan *share poverty* (kemiskinan yang terbagi) diantara masyarakat desa. Involusi pertanian yang terjadi di Jawa disebabkan lahan milik petani dijadikan lahan untuk menanam tanaman ekspor sehingga petani kecil kehilangan lahan untuk tanaman palawija. Tuan-tuan tanah dan buruh tani berusaha memenuhi kebutuhan subsistensinya. *Share poverty* membuat tuan tanah mendapat bagian kecil dari usahataniannya karena hasil yang diperoleh digunakan untuk menghidupi buruh-buruh tani dan keluarganya yang bekerja padanya. Pada akhirnya kerumitan sistem pertanian ini tidak memunculkan kelas-kelas sosial yang tajam.

Status sosial dalam masyarakat desa dapat dilihat dari status penguasaan lahan. Ali et al. (2018) membagi status petani berdasarkan penguasaan lahan ke dalam tujuh tingkatan. Status tersebut dikenal sebagai: (a)

³ James C. Scott. 1981. Moral Ekonomi Petani. Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. LP3ES. Hal. 124

tuan tanah yaitu orang yang memiliki tanah tetapi tidak menggarapnya melainkan memberikannya kepada orang lain untuk menggarapnya; (b) petani pemilik yaitu petani yang hanya menggarap lahan miliknya sendiri; (c) petani penggarap atau penyakap yaitu petani yang menggarap lahan orang lain dengan sistem bagi hasil; (d) petani pemilik penggarap yaitu petani yang disamping memiliki lahan sendiri juga menggarap lahan orang lain dengan sistem bagi hasil; (e) petani gadai yaitu petani yang menggarap lahan yang digadainya; (f) petani penyewa adalah petani yang menyewa lahan orang lain untuk periode tertentu; dan (g) buruh tani yaitu orang yang terlibat dalam aktivitas pertanian melalui upah.

Permasalahan Tanah Pertanian Oleh Kegiatan Tambang

Tanah-tanah pertanian milik petani kecil di Indonesia secara umum belum banyak yang memiliki legitimasi. Hal ini menyebabkan tidak ada kepastian hukum status kepemilikan lahan yang diolah ataupun diklaim oleh petani. Akibatnya, permasalahan penguasaan lahan yang seringkali tumpang tindih menyangkut dimensi ekonomi, sosial dan budaya menjadi sebuah keniscayaan. Bahkan tidak jarang lahan dengan status yang jelaspun menimbulkan masalah sosial karena tumpang tindih kebijakan pemerintah.

Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara adalah daerah pertanian padi sawah yang subur. Produksi padi sejak daerah ini mulai menanam selalu melimpah ruah hingga penduduk lokal menyebutnya sebagai daerahnya Dewi Sri atau Dewi Padi yang hidup dalam legenda masyarakat Hindu. Penduduk di Kabupaten Bombana khususnya di Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara sangat heterogen terdiri banyak dari berbagai daerah di Indonesia sebab merupakan wilayah penempatan transmigran asal Bali, NTB dan Jawa. Di daerah ini hidup masyarakat local suku Moronene yang merupakan tuan-tuan tanah dimana mereka memiliki tanah ulayat yang luas. Pertambangan emas pada akhir tahun 2008, menggeser struktur kepemilikan lahan-lahan pertanian dan perkebunan menjadi milik kuasa pertambangan (Meisanti, et.al.

2012). UU Agraria yang mengakui tanah ulayat masyarakat adat menjadi tidak berarti dengan adanya UU lain yang lebih baru dan bersifat *Lex Specialis*⁴ yang memberikan wewenang kepada Pemda setempat (Bupati) untuk mengeluarkan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang seringkali mencaplok tanah ulayat.⁵ Keadaan ini meresahkan masyarakat lokal sebab tidak ada aturan jelas mengenai pembagian hasil ataupun keuntungan dengan pemilik lahan. Sebagai contoh, seorang pemilik lahan kebun seluas 10 ha di daerah tambang mengeluhkan bahwa tanah tersebut meskipun milik pribadi namun tidak dapat diolah sebab masuk ke dalam wilayah dari salah satu perusahaan yang telah memperoleh IUP untuk eksplorasi. Hal ini terjadi pada banyak penduduk Bombana lainnya. Kondisi ini merupakan *Trigger factor* yang dapat menimbulkan konflik. Hal ini dapat dimaklumi karena daerah yang menghasilkan tambang justru merupakan kantong-kantong penyumbang orang miskin terbesar di Indonesia. (Meisanti, 2014).

Meisanti dan Tenri (2016) menjelaskan perubahan oleh pertambangan yang mempengaruhi lahan pertanian masyarakat. Kegiatan penambangan emas selama lebih dari tujuh tahun telah mempengaruhi lingkungan fisik (tanah, air, udara) di mana petani menanam tanaman dan telah menyebabkan perubahan sosial dalam komunitas petani. Perubahan sosial yang terjadi terdiri dari perubahan dan pertumbuhan populasi yang besar, perubahan struktur sosial, perubahan interaksi sosial, dampak psikososial dan perubahan budaya (nilai uang).

⁴ *Lex Spesialis derogat legi Generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

⁵ Pemberian ijin eksplorasi dan produksi kepada kuasa-kuasa pertambangan merupakan wewenang Bupati Bombana yang menurut Gubernur Sultra, Nur Alam memerlukan kontrol dari pemerintah pusat. Akan tetapi UU yang berlaku tidak memberikan ruang kepada Gubernur selaku perpanjangan pemerintah pusat di provinsi untuk melakukan kontrol. Akibatnya, terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan lima UU yaitu UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup, UU Tata Ruang, UU Perhubungan dan UU Pertambangan. (hasil wawancara live Metro TV dengan Gubernur Sultra, tanggal 26 Januari 2012)

Di Morowali, konflik kepentingan lahan oleh berbagai korporasi terjadi terutama seputar Bahodopi. Wilayah ini adalah daerah yang paling sering diributkan oleh berbagai perusahaan tambang terutama Rio Tinto dan Inco. Selain itu terdapat 43 IUP yang diterbitkan oleh Bupati Morowali Anwar Hafid juga kerap menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat. Kasus lainnya adalah Kasus Bima dimana warga Desa Sumi, Rato dan lainnya dikecamatan Sape dan Lambu tidak pernah tahu jika wilayah hidup mereka sudah dikapling untuk pertambangan. Bupati melalui SK bernomor 188/45/357/004/2010 memberikan izin bagi PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN). Saat PT SMN melakukan aktivitas eksplorasi di lokasi seluas 24.980 Ha barulah warga mengetahui. Akibatnya berakhir dengan kemarahan penduduk yang dilampiaskan secara anarki kepada pemerintah setempat (Bupati). Sebulan setelah Kasus Bima, kemarahan massa juga terjadi di Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara yang juga diakibatkan pertambangan. (Meisanti, 2014)

Ekspansi tambang terhadap wilayah-wilayah pertanian di pedesaan seluruh Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), hal ini semakin luas sejak pemerintahan Soesilo Bambang Yudoyono dimana pada bulan Januari 2012, jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai 9.662. Dari jumlah tersebut lebih dari 75 persen tumpang tindih dengan peruntukan lainnya, bahkan dengan hutan lindung dan Taman Nasional. Selain daratan, pulau-pulau semakin banyak yang terekspansi tambang. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam, 2017) memperkirakan bahwa sekitar 1,7 juta ton beras per tahun hilang akibat pertambangan batu bara. Selain itu, 6 juta ton produksi beras per tahun di tanah garapan terancam hilang per tahun. Jika terjadi pertambangan di konsesi batu bara yang berada di tanah yang diidentifikasi mampu dimanfaatkan untuk cocok tanam beras, akan ada tambahan 11 juta ton beras per tahun yang hilang.

Pertambangan batu bara berdaya rusak lebih besar terhadap produksi pangan Indonesia di masa depan, daripada penggunaan tanah lainnya. Jatam (2017) merekomendasikan jika Indonesia tidak mampu kehilangan tanah penghasil pangan yang berharga dan Indonesia juga tidak dapat membiarkan sumber daya airnya, yang penting untuk tanaman, menjadi terpolusi dan tercemar oleh endapan maka Pemerintah Nasional harus mengubah prioritas tata guna tanahnya secara radikal.

Krisis Sumber Daya Manusia Unggul di bidang Pertanian

Di era global saat ini dimana pertanian konvensional semakin tergeser menuju ke pertanian 4.0, kondisi petani di Indonesia belum banyak berubah. Mereka masih menempati kelas sosial rendah di masyarakat, miskin dan tidak memiliki posisi tawar. Tidak heran jika generasi milenial tidak tertarik untuk bekerja di sector pertanian. Mengapa minat generasi milenial terdidik kurang untuk bekerja di sector pertanian sedangkan lulusan perguruan tinggi di bidang pertanian cukup besar? Generasi milenial yang saat ini menjadi mahasiswa ataupun telah lulus dari perguruan tinggi beranggapan bahwa sektor pertanian memiliki stigma yang melekat seperti hidup miskin, kotor, bekerja keras, resiko besar, tidak keren dan jauh dari kota. Belum lagi rendahnya dukungan keluarga kepada anak-anak petani yang dikirim ke kota untuk kuliah dimana mereka diharapkan tidak kembali ke desa untuk bertani. Keluarga petani berharap anak-anak mereka yang kuliah di kota akan bekerja di sektor lain dan mendapat kehidupan yang lebih baik dari yang telah dijalani keluarga tani. Padahal generasi milenial yang kreatif dan inovatif merupakan potensi bangsa untuk memajukan pertanian Indonesia. Data BPS Indonesia menyebutkan bahwa selama lima tahun terakhir jumlah petani merosot dari 38,9 juta tahun 2014 menjadi sekitar 24 juta tahun 2018. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian. Bahkan mereka yang memilih kuliah di fakultas pertanian sekalipun berharap selepas menjadi sarjana

mereka tidak lagi kembali ke kampung masing-masing untuk menjadi petani seperti orangtua mereka tetapi bermimpi untuk menjadi dosen, birokrat ataupun teknokrat pertanian yang bekerja di Kota. Data BPS tahun 2019 memperlihatkan tenaga kerja pertanian saat ini didominasi oleh usia tua diatas 40 tahun dengan pendidikan SD ke bawah dan hanya 2 persen yang tamat perguruan tinggi. Sementara pertumbuhan penduduk dan perkembangan global menuntut sumber daya manusia yang unggul di sektor pertanian.

Kenyataan ini adalah tantangan bagi pemerintah untuk menjadikan pertanian di Desa sebagai sektor yang menarik dan menjanjikan masa depan bagi generasi muda bangsa. Saat ini yang bertahan menjadi petani adalah petani-petani yang kebanyakan telah berusia tua dimana secara sosiologi antropologi petani tua selalu mempertahankan budaya turun temurun termasuk cara hidupnya dalam pertanian (Dobrowolski, 1958), oleh Polanyi disebut telah *embedded* (melekat) dalam kehidupan petani. Fenomena petani tua dapat terlihat pada desa-desa di Yogyakarta dimana hanya ada petani-petani tua yang bekerja di lahan-lahan sawah. Di jalan-jalan desa ditemukan petani-petani tua sedang mengayuh sepeda ataupun berjalan kaki sambil membawa barang-barang pertanian seperti pupuk dan rumput untuk ternak. Hal yang sama juga ditemukan di sebuah Desa di Jawa Barat. Pada sebuah perkebunan teh di daerah puncak Bogor, pekerja pemetik teh sebagian besar terdiri dari orang-orang yang telah berumur, bukan petani muda. Mereka yang muda kebanyakan melakukan migrasi ke kota untuk bekerja di sektor lain.

Mereka yang muda, akan memilih ke luar dari desa dengan cara apapun. Ada yang melanjutkan pendidikan, sebagian mengadu nasib bekerja di Kota pada sektor-sektor informal oleh kurangnya sumberdaya manusia yang dimilikinya dan menjadi masalah baru bagi Kota. Sebagian lagi memilih menjadi TKI ke luar negeri. Fenomena ini semakin massif di beberapa tahun terakhir sehingga menimbulkan berbagai implikasi baik di desa maupun di kota. Mollett

(1991) menyatakan bahwa begitu banyak variasi dan begitu banyak faktor yang mempengaruhi hasil migrasi pedesaan memberikan dasar bagi klaim bahwa setiap migrasi adalah unik. Dalam arti tertentu, ini benar dan belum ada fitur umum setiap kali migrasi berlangsung dalam berbagai periode waktu dan lokasi. Semua migran memiliki tujuan bersama untuk menyelesaikan, beradaptasi dan akhirnya mencari 'kehidupan yang lebih baik'.

Desa menjadi sunyi oleh mereka yang muda, pintar, kuat dan berani meninggalkan Desa. Fenomena ini secara sosiologis pasti akan terjadi. Petani secara rasional selalu akan memilih jalan hidup yang menjanjikan harapan bagi peningkatan kesejahteraannya. Popkin (1979) dalam bukunya *The Rational Peasant* telah menganalisis hal ini pada masyarakat petani di Vietnam pada tahun 1966 dan 1970 dalam tiga periode yang disebutnya pra kolonial, kolonial dan periode awal revolusi (*precolonial, colonial and early revolutionary periods*). Popkin memandang petani sebagai bagian masyarakat yang rasional, ia tidak setuju bahwa petani hanya mempertimbangkan moralnya dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Demikianlah yang terjadi pada petani kita. Sekalipun mereka termasuk golongan yang paling banyak hidup dalam kemiskinan dan bergantung pada *social insurance* yang tersedia di Desa, seperti ketika mereka lapar selalu ada tetangga yang membagi makanannya, ketika memerlukan modal maka patron di desa menyediakannya sekalipun tidak jarang hanya dapat dibayar dengan kesetiaan. Petani secara moral terikat dengan kehidupan pertanian di desanya namun petani juga adalah manusia rasional yang ingin sejahtera dengan merubah kehidupannya.

Selama pertanian tidak menjanjikan kehidupan yang layak, selama keberpihakan pemerintah kepada petani belum sepenuhnya tertuang dalam kebijakan harga, input, modal dsb dapat diimplementasikan dengan baik maka pertanian di Indonesia akan menjadi pilihan terbawah bagi masyarakat desa. Selama kebijakan ekspor dan impor belum berpihak pada petani maka pertanian

akan terus ditinggalkan. Peradaban global yang telah menjangkau ke pelosok melalui *phone cell* dan internet akan mempercepat peningkatan kesadaran dan keinginan untuk hidup layak. Desa akan semakin sunyi dari kegiatan pertanian di tahun-tahun mendatang. Sementara penduduk Negara ini terus bertambah dengan pesat, jutaan manusia perlu makanan yang hanya dapat disediakan melalui kegiatan bercocok tanam di desa. Maka jika dibiarkan, ke depan fenomena ini akan berbahaya bagi stabilitas negara. Jika ketersediaan pangan dalam negeri tidak mencukupi apakah pemerintah akan menggantungkan nasib 265 juta penduduk (yang terus bertumbuh) dengan melakukan kebijakan impor bahan pangan?

Daftar Pustaka

- Ali, M.S.S., A. Yunus, D. Salman, E.B. Demmallino, 2018. Rasionalitas Petani dalam Merespons Perubahan Kelembagaan Penguasaan Lahan dan Panen pada Usahatani Padi, *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* Volume 14(1).
- Dobrowolski, Kazimierz. 1958. Peasant Traditional Culture. *Ethnografia Polska*, volume 1. pp 19-56 dalam Shanin, Teodor. *Peasant and Peasant Societies*. Penguin Modern Sociology Readings.
- Geertz, Clifford. 1963. *Agricultural Involution. The Process of Ecological Change*. University of California Press. Berkeley and Los Angeles, California.
- Jaringan Advokasi Tambang. 2017. *Hungry Coal. Pertambangan Batubara dan Dampaknya terhadap Ketahanan Pangan Indonesia*. https://www.jatam.org/wpcontent/uploads/2017/05/HungryCoal_Bahasa_Indonesia-1.pdf (diakses 10 Maret 2020).
- Marx, Karl. *Capital A Critique of Political Economy* Volume I. 1887. Progress Publishers, Moscow, USSR. <https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital-Volume-I.pdf> (diakses 9 Maret 2020)

- Meisanti.,M.S.Ali.,K.Jusoff.,D.Salman.,D.Rukmana. 2012. The impacts of gold mining on the farmer's community." *American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture*. 6(4):209-214.
- Meisanti. 2014. Perubahan *Fungsi Kelembagaan Pertanian Sebagai Dampak Pertambangan Emas di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara*. Disertasi. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Meisanti., Tenri, Andi. 2016. Social Changes in Peasant Community Due to Gold Mine. *Scientific Journal of PPI – UKM*. Vol 3(2):43-49.
- Mollett, J.A. 1991. *Migrants in Agriculture Development. A Study of Intrarural Migration*. Macmillan Academic and Professional Ltd.
- Mosher, A.T. 1991. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian: Syarat-Syarat Pokok Pembangunan dan Modernisasi*. Jakarta: CV Yasaguna
- Polanyi, K. 1998. "Societies and Economic System dalam George Dalton (ed). *Primitive, Archaic and Modern Economies, Essay of Karl Polanyi*. Boston: Beacon Press.
- Popkin, Samuel L. 1979. *The Rational Peasant*. University of California Press.
- Scott, James.C. 1981. *Moral Ekonomi Petani. Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. LP3ES.
- Soemarwoto, Otto. 2008. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Intan Sejati Klaten
- Sasongko, Agung. 2018. Mengenal Ibnu Al-Awwam, Ahli Pertanian Andalusia. *Republika.co.id*. Terbit 30 April 2018 (diakses 6 Maret 2020)
- Sasongko, Agung. 2019. Mengenal Kontribusi Al Dinawari bagi Peradaban Dunia. *Republika.co.id*. Terbit 19 Agustus 2019 (diakses 7 Maret 2020)
- Tohir, Kaslan A. 1991. *Seuntai Pengetahuan Usahatani Indonesia*. PT Rineka Cipta